



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 5 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam upaya mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan fungsional Pemerintahan Kabupaten Ngawi yang berdasar azas obyektivitas, konsistensi, akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2023, Nomor 1032).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Ngawi Tahun 2024, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;
Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat
dan Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/ 5 /404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

URAIAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
 INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2024

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan ruang lingkup:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/ atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

- a. pengendalian inflasi daerah;
- b. kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- c. tingkat pengangguran terbuka;
- d. investasi dan pelayanan publik; dan/atau
- e. penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1	2	3
2.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Perangkat Daerah	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>
3.	Meningkatnya kualitas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
4.	Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan daerah; 2) Belanja daerah; dan 3) Pembiayaan daerah; <p>dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>

1	2	3
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketetapan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (<i>output</i>) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu :</p> <p>1) hibah dan bantuan sosial;</p> <p>2) pengadaan barang dan jasa; dan</p> <p>3) perjalanan dinas.</p>
3.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan pembiayaan daerah	Pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1	2	3
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan	a. sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengelolaan deposito c. pengelolaan persediaan; dan d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu Laporan Keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	Sasaran	Fokus
1	2	3
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	<i>Probity Audit</i> terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memadai dan berkualitas.	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1	2	3
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i>).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan isu gender.
6.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa.	<ul style="list-style-type: none"> a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa; d. konsistensi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa melalui <i>E-Purchasing</i> .

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	Monitoring kepatuhan dan ketetapan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;

1	2	3
		<p>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi :</p> <p>1) Pre-implementasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi. <p>2) implementasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. <p>3) Pasca Implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	<p>a. dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</p> <p>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.</p>
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

1	2	3
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi : a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. Penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).	Keterapatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi : a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>elektronic payment</i> dan <i>elektronic catalog</i> .
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi : a. perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah; e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.

1	2	3
9.	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan Masyarakat.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1	2	3
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b. Pengelolaan sumber daya manusia; c. Praktik profesional; d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. Budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	<i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.

1	2	3
3.	Meningkatnya penerapan manajemen risiko.	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu :</p> <p>a. Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. <p>b. Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i>.
4.	Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan pelayanan publik; b. pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); c. pengawasan keuangan daerah; d. audit kinerja; e. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; f. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; g. audit investigasi; h. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; i. <i>Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>; dan j. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

II. JADWAL KEGIATAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

No.	Nama PKPT	Jenis Pengawasan	Hari Pemeriksaan	Jabatan dalam Tim Teknis Pemeriksaan	Jumlah Personil	Rencana Masuk Pemeriksaan	Rencana Penerbitan Laporan	Risiko Audit	Jumlah Laporan	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Januari	Desember	Tinggi	6	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
2	Pemeriksaan Indisipliner	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Januari	Desember	Sedang	4	Irban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
3	Evaluasi Inflasi Daerah	Assurance	12	Penanggung jawab	1	Januari	Desember	Sedang	12	Irban Wilayah IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pengawasan Pelayanan Publik Pendidikan/Pengawasan Pelayanan Publik Kesehatan/Pengawasan Tata Kelola BMD/Pengawasan Pendapatan	Assurance	13	Penanggung jawab	1	Januari	Februari	Sedang	4	Urban I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	21					
5	Pemeriksaan Kinerja	Assurance	40	Penanggung jawab	1	Februari	April	Tinggi	1	Urban Wilayah II
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
6	Pemeriksaan Belanja Daerah	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Februari	Februari	Sedang	3	Urban Wilayah II,III dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	3					
				Pengendali Teknis	3					
				Ketua	3					
				Anggota	16					
7	Pendampingan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Februari	Februari	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Pendampingan Zona Integritas Semester I	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Februari	Februari	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
9	Pendampingan IEPK	Consulting	10	Penanggung jawab	1	Februari	Februari	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
10	Probity Audit	Consulting	20	Penanggung jawab	1	Februari	November	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	6					
11	Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Consulting	20	Penanggung jawab	1	Februari	November	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Evaluasi PPRG	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Februari	Maret	Sedang	3	Urban Wilayah I,III dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	3					
				Pengendali Teknis	3					
				Ketua	3					
				Anggota	16					
13	Reviu LKPD	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Februari	Maret	Sedang	1	Urban Wilayah III
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	6					
14	Reviu LPPD	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Februari	Maret	Sedang	1	Urban Wilayah I
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	7					
15	Evaluasi Manajemen Risiko	Assurance	16	Penanggung jawab	1	Maret	Maret	Sedang	46	Urban Wilayah I, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	3					
				Pengendali Teknis	3					
				Ketua	6					
				Anggota	13					
16	Pendampingan LHKASN	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Maret	Maret	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Reviu Dana Alokasi Khusus Fisik/ Reviu Dana Alokasi Umum Tahap I, II, dan III	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Maret	Oktober	Sedang	48	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	21					
18	Evaluasi Reformasi Birokrasi Triwulan I	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Maret	Maret	Sedang	1	Urban Wilayah III
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
19	Rencana Aksi SPI Semester I	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Maret	Maret	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
20	Reviu Standar Harga Satuan (SHS)	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Maret	April	Sedang	17	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
21	Bimtek APIP	Consulting	3	-	53	April	April	Sedang	1	Seluruh APIP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Assurance	45	Penanggung jawab	1	April	September	Sedang	57	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	21					
23	Reviu RKPD	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Mei	Mei	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
24	Bimtek APiP	Consulting	3	-	3	Mei	Mei	Sedang	1	Seluruh APiP
25	Pendampingan SPIP	Consulting	12	Penanggung jawab	1	Mei	Juni	Sedang	1	Urban Wilayah IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	2					
				Anggota	4					
26	Reviu RKPD P	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juni	Juni	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Evaluasi Benturan Kepentingan Semester I	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juni	Juni	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
28	Pemantauan Tindak Lanjut APIP Semester 1	-	5	Penanggung jawab	1	Juni	Juni	Sedang	20	Seluruh APIP
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	5					
				Pengendali Teknis	5					
				Ketua	10					
				Anggota	21					
29	Audit Informasi Teknologi (IT)	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Juni	Juli	Sedang	20	Urban Wilayah II
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	4					
30	Reviu Renja	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Reviu Renja Perubahan Tahun 2024	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
32	Reviu Analisis Standar Biaya	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
33	Reviu Bantuan Keuangan	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Juli	Desember	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
34	Reviu KUPA Tahun 2024	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Reviu Manajemen ASN	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Juli	Juli	Sedang	1	Irbn Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
36	Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Juli	Agustus	Sedang	1	Irbn Wilayah I, II, dan III
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
37	Penjaminan Kualitas SPIP	Assurance	15	Penanggung jawab	1	Agustus	Agustus	Sedang	1	Irbn Wilayah IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
38	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan dan Tindak Lanjutnya	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Agustus	Agustus	Sedang	1	Irbn Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Reviu KUA	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Agustus	Agustus	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
40	Pendampingan Zona Integritas Semester II	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Agustus	Agustus	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
41	Reviu RKA SKPD Perubahan TA. 2024	Assurance	5	Penanggung jawab	1	September	September	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	17					
42	Reviu RKA 2025	Assurance	5	Penanggung jawab	1	September	September	Sedang	1	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan dan Tindak Lanjutnya	Assurance	10	Penanggung jawab	1	September	September	Sedang	1	Urban Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	8					
				Anggota	13					
44	Penugasan Mandatory	Assurance	12	Penanggung jawab	1	September	Oktober	Sedang	4	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	17					
45	Reviu Bantuan Sosial/Reviu Tata Kelola Pajak Daerah dan Tindak Lanjutnya	Assurance	10	Penanggung jawab	1	Oktober	November	Sedang	4	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	17					
46	Monitoring dan Evaluasi Dana BOS	Assurance	10	Penanggung jawab	1	November	November	Sedang	4	Urban Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	17					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Pemeriksaan BUMDes	Assurance	10	Penanggung jawab	1	November	November	Sedang	40	Irbn Wilayah I, II, III, dan IV
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	4					
				Anggota	17					
48	Evaluasi Benturan Kepentingan Semester II	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Desember	Desember	Sedang	1	Irbn Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
49	Rencana Aksi SPI Semester II	Assurance	5	Penanggung jawab	1	Desember	Desember	Sedang	1	Irbn Khusus
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	1					
				Pengendali Teknis	1					
				Ketua	1					
				Anggota	5					
50	Pemantauan Tindak Lanjut APIP Semester 2	-	5	Penanggung jawab	1	Desember	Desember	Sedang	20	Seluruh APIP
				Pembantu Penanggung Jawab	1					
				Pengendali Mutu	4					
				Pengendali Teknis	4					
				Ketua	10					
				Anggota	29					

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO